

Abstrak

Banyak studi telah membahas dampak negatif kebijakan relokasi terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) pada konteks pembangunan pariwisata perkotaan. Akan tetapi, sejauh ini PKL masih dilihat sebagai kelompok homogen yang mengalami dampak yang sama. Dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik, penelitian ini menentang gambaran simplistik tersebut dengan memperlihatkan bahwa kebijakan relokasi memberikan dampak berbeda terhadap kelompok PKL yang berbeda. Menggunakan studi kasus terhadap kebijakan relokasi PKL Teras Malioboro 2, penelitian ini menunjukkan terjadinya diferensiasi kelas di antara PKL (pemberi kerja, produsen kecil komoditas/PKK, dan pekerja) sebelum relokasi dan bagaimana mereka mengalami transformasi kelas pasca relokasi. Pasca relokasi, sebagian Pemberi Kerja mampu bertahan di kelasnya dan memperluas usaha, sebagian lainnya kehilangan modal hingga menjadi pekerja upahan. PKK memperlihatkan kondisi kerja yang lebih kompleks, sebagian masih mampu bertahan di kelasnya dengan mengubah strategi berjualan atau menyewa lapak tambahan, sebagian lainnya mampu melakukan akumulasi melalui remitansi, dan sebagian lainnya harus berhenti menjalankan usaha sendiri dan memutuskan untuk menjadi pekerja upahan. Sementara itu, Pekerja menghadapi kondisi rentan yang terlihat dari jam kerja lebih panjang dengan upah stagnan bahkan menurun. Penelitian ini memperluas pemahaman terhadap proses relokasi yang tidak hanya menyebabkan proletarisasi melainkan juga menunjukkan transformasi kelas yang beragam. Dengan demikian, kebijakan yang dibuat berkaitan dengan PKL tidak bisa menggunakan satu ukuran saja dan perlu dibentuk berdasarkan pada diferensiasi kelas PKL.

Kata kunci: neoliberalisme; pedagang kaki lima; pembangunan pariwisata perkotaan

Abstract

Many studies have discussed the negative impacts of relocation policies on street vendors in the context of urban tourism development. However, those studies often portray them as a homogeneous group experiencing the same effects. Using a political economy approach, this research challenges such a simplistic view by showing that relocation policies produce different effects on various groups of street vendors. Based on an Indonesian case study of the relocation of Teras Malioboro 2 vendors, this study reveals the existence of class differentiation among vendors—namely, employers, petty commodity producers, and workers—prior to relocation, and examines how these groups experienced class transformations afterward. After relocation, some employers were able to maintain their class position and expand their businesses, while others lost capital and became wage workers. Petty commodity producers experienced more complex working conditions: some managed to stay in their class by adjusting selling strategies or renting additional stalls, others succeeded in accumulating capital through remittances, and some had to stop running their own businesses and chose to become wage workers. Meanwhile, workers faced increasingly precarious conditions, including longer working hours with stagnant or even declining wages. This research broadens the understanding of relocation processes, showing that they not only lead to proletarianization, but also to diverse forms of class transformation. Therefore, policies concerning street vendors cannot be designed using a one-size-fits-all approach—they must be formulated based on the class differentiation among vendors.

Keywords: *neoliberalism; street vendors; urban tourism development*